

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepada pihak-pihak yang berwenang (Sutrisno, 2007). Di era reformasi ini, terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat penting bagi setiap negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Hal ini tidak hanya berlaku bagi pemerintah pusat, tetapi juga mencakup pemerintah daerah yang diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Untuk mencapai kinerja pemerintahan daerah yang baik, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun dengan baik dan memenuhi standar akan memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder), khususnya dalam mewujudkan transparansi kepada masyarakat (Mahartini et al., 2021).

Salah satu langkah terpenting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara ditangani dengan baik adalah dengan meninjau dan menjelaskan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP adalah prinsip akuntansi tersendiri yang harus digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan mengacu pada seperangkat dokumen yang dibahas secara sistematis mengenai posisi uang dan berbagai transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Karena itu, implementasi SAP merupakan syarat yang mampu meningkatkan jumlah uang yang dimiliki pemerintah Indonesia secara legal. Sistem Pengendalian Internal (SPI) juga berdampak pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Fungsi Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah untuk memberikan keyakinan yang paling efisien dan efektif dalam proses akuntansi. Oleh karena itu, penerapan SAP menjadi syarat yang bersifat mengikat secara hukum dalam rangka meningkatkan mutu laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik juga dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern (SPI). Sistem Pengendalian Intern

(SPI) berfungsi memberikan keyakinan tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internalnya. Kemudian dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Pemanfaatan teknologi dalam aplikasi komputer akuntansi pada pemerintah daerah sangat penting dalam membantu aparat pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan sehingga lebih efektif, efisien, dan ekonomis (Mahartini et al., 2021). Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dapat memberikan informasi yang relevan dan berguna bagi para penggunanya. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Kualitas LKPD setiap tahunnya akan dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui pemberian opini. Opini tersebut merupakan pernyataan profesional dari auditor yang menunjukkan tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan tersebut. Penilaian oleh BPK didasarkan pada Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Dalam aturan ini, opini atas laporan keuangan pemerintah daerah diberikan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu : (1) Efektivitas sistem pengendalian intern (2) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (3) Kecukupan informasi yang diungkapkan, dan (4) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.

Setiap tahun, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui pemberian opini. Jika BPK menyatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka hal tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas telah disusun dan diungkapkan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, serta mencerminkan kualitas pelaporan yang baik. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan BPK terhadap LKPD, yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat

(TMP). Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas LKPD Kabupaten Bondowoso TA 2020, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan opini ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempertahankan raihan opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut, yaitu dari TA 2014 s.d. TA 2020. Dalam pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Bondowoso TA 2020, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam kelemahan pada pelaporan keuangan Sistem Internal seperti yang dikutip media online Jatim.bpk.go.id (2021). Permasalahan tersebut di antaranya:

1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tertib.
2. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memadai.
3. Pengadaan Pekerjaan Sistem Rancang Bangun Kamar Operasi RSUD Dr. H. Koesnadi tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, Pada hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Bondowoso 2022 berdasarkan hasil yang dikutip Jatim.bpk.go.id Kabupaten Bondowoso tetap meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian sehingga raihan opini WTP menjadi delapan tahun berturut-turut. Namun ditemukan fenomena seperti yang dikutip dalam media online www.rri.co.id (2023). Masalah penarikan retribusi pasar diketahui menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemkab Bondowoso Tahun 2022. Dalam hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut, UPT Pasar pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bondowoso dinilai belum tertib dalam mengelola pasar karena tidak sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD). Adapun, laporan realisasi anggaran tahun 2022 menyajikan realisasi Pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 16 miliar atau 88,30 persen dari anggaran sebesar Rp 19 miliar. Anggaran tersebut diperoleh dari pendapatan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp 1,1 miliar atau 107,93 persen dari nilai anggaran sebesar Rp 1 miliar. Retribusi pelayanan itu diantaranya pemakaian pelataran, los dan kios milik pemerintah oleh para pedagang. Pemungutan atas retribusi pasar dilakukan oleh petugas pemungut berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD). Ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pemungutan retribusi pasar tidak menggunakan SKRD atau dokumen yang

dipersamakan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. BPK menilai, hal itu tidak sesuai perda nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan keempat atas peraturan nomor 16 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum. Dalam Perda itu juga mengatur pemungutan retribusi melalui SKRD atas dokumen lain yang dipersamakan. BPK menemukan petugas pemungut justru menggunakan kartu kontrol yang dibuat oleh petugas pemungut untuk masing-masing pedagang. Dalam kartu itu hanya berisi informasi besaran tagihan bulanan selama setahun.

Sejumlah penelitian telah dilakukan tentang kualitas catatan keuangan pemerintah. Penelitian ini merupakan bagian dari studi yang dilakukan oleh Mahartini et al. (2021) tentang dampak penerapan Standar Pemerintahan Akuntansi, Sistem Magang, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Uang di Pemerintah Kabupaten Karangasem. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Magang dan Standar Pemerintahan Akuntansi tidak berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Sebaliknya, variabel sistem informasi akuntansi berdampak positif terhadap kualitas keuangan laporan. Menurut hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Wulandari et al. (2020) terhadap Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Standard Akuntansi Pemerintahan, dan System Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri), ketiga sistem ini memiliki sifat positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan.

Berdasarkan uraian diatas serta melihat dari fenomena yang terjadi tentang BPK memnerikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun masih terdapat permasalahan dalam rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang dibuktikan dengan adanya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso”

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Bondowoso?
2. Apakah Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Bondowoso?
3. Apakah Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Bondowoso?"
4. Apakah Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem pengendalian Internal (SPI), dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berpengaruh secara simultan terhadap kualitas lapotan keuangan pemerintah Kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan Standart Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Sistem Informasi Akuntansi

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan untuk :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang Pengaruh Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Internal (SPI), Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan atau referensi yang berguna dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja serta laporan keuangan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi pemikiran terkait penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai dasar perbaikan bagi masing-masing entitas pemerintahan dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan berharga bagi penelitian selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian terkait Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terhadap kualitas laporan keuangan